

A Comparative Study of Inter-Provincial Inclusive Economic Growth in Indonesia 2010-2015 with Approach Methods of ADB, WEF, and UNDP

Agnes Vera Yanti Sitorus¹ and Ade Marsinta Arsani²
Central Bureau of Statistics - Indonesia

ABSTRACT

Economic growth is the most widely used measure of economic activity. Indonesia as one of G-20 has positive economic growth while global economy downturn. Nevertheless, income inequality rises from 0,363 in 2005 to 0,394 in 2016. High growth GDP does not guarantee that all persons will benefit equally. GDP have limitation in reflection the distribution of income, social and economic progress. Therefore, it takes more than economic growth to ensure that the growth of economic activity can be obtained by all levels of society. This study uses three main references to measure the inclusiveness of economic growth, namely techniques introduced by United Nation Development Programme (UNDP), Asian Development Bank (ADB), and World Economic Forum (WEF). The results of this study indicate that the measurement of inclusive economies in Indonesia generally shows satisfactory results. If different techniques approached is applied, there is a difference in status of inclusiveness in 33 provinces and still inequalities in some variables, mainly occurs in infrastructure, education, and income. Therefore, program priority is needed to deal with that problems.

Keywords: Gross domestic product (GDP), inequality, inclusive growth

¹ Agnes Vera Yanti Sitorus is Head of Section of Balance of Nonprofit Institutions, Directorate of Expenditure Balance, Indonesia Central Bureau of Statistics. Email: agnes@bps.go.id.

² Ade Marsinta Arsani is a Functional Statistician, Indonesia Central Bureau of Statistics. Email: ade.marsinta@bps.go.id

Komparasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di 33 Provinsi Indonesia Tahun 2010-2015: Studi Kasus Menggunakan Metode Pendekatan ADB, WEF, DAN UNDP

Agnes Vera Yanti Sitorus dan Ade Marsinta Arsani, BPS

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masuk dalam G-20, ukurannya adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Perekonomian Indonesia mampu tumbuh sekitar 4-6 persen per tahun selama dekade terakhir ini, di saat negara-negara maju mengalami perlambatan ekonomi. Di sisi lain, ketimpangan pendapatan naik dari 0,363 tahun 2005 menjadi 0,394 di September 2016. Credit Suisse, sebagaimana dikutip dari Katadata (2017) mencatat bahwa 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49 persen kekayaan nasional. Sementara, 10 persen orang terkaya menguasai 77 persen total kekayaan nasional.

Ketimpangan tidak hanya terkait pendapatan dan kekayaan namun juga berhubungan dengan ketimpangan kesempatan seperti akses pendidikan dan kesehatan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin semua masyarakat menerima manfaat yang sama. Untuk memperoleh ukuran yang mampu menjelaskan pertumbuhan ekonomi dan masalah sosial, beberapa lembaga internasional seperti Asian Development Bank (ADB), World Economic Forum (WEF) dan United Nation Development Programme (UNDP) menciptakan suatu set variabel dan formula untuk melakukan pengukuran pertumbuhan ekonomi alternatif yang menekankan pada kesetaraan akses terhadap peluang ekonomi bagi semua lapisan masyarakat. Ukuran ini disebut dengan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Menurut ADB (2011), ada beberapa alasan mengapa pertumbuhan harus inklusif yaitu:

1. Pertimbangan kesetaraan dan keadilan, pertumbuhan seharusnya terdistribusi dan inklusif di seluruh lapisan masyarakat dan daerah.
2. Pertumbuhan dengan ketimpangan yang persisten dapat membahayakan kondisi sosial, seperti orang miskin dan pengangguran lebih rentan masuk dalam aktivitas kriminal, perempuan lebih rentan ke prostitusi, dan tenaga kerja anak yang tidak diharapkan.
3. Ketimpangan dalam hasil dan akses yang berkelanjutan dapat mengganggu stabilitas politik dan struktur sosial sehingga mengurangi potensi pertumbuhan yang berkelanjutan.

Badan Pusat Statistik (2013) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif Indonesia tahun 2010-2012 telah memuaskan. *Inclusive Growth Index* (IGI) senantiasa mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari 5,80 di tahun 2010 menjadi 5,92 di tahun 2012. Dilihat antar provinsi, pada tahun 2012 IGI seluruh provinsi Indonesia berada pada level memuaskan (4,00-7,99). Dengan mengadopsi metode sebelumnya, penelitian ini ingin mengukur pertumbuhan inklusif melalui dua pendekatan yaitu: pendekatan *single indicator* dan indeks komposit dengan memodifikasi beberapa indikator yang relevan dengan permasalahan di 33 provinsi.

Mempertimbangkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto 2010-2015 yang selalu tinggi (sekitar 6 persen), penelitian ini juga ingin menyusun tingkat inklusivitas di 33 provinsi dengan tidak memasukkan pertumbuhan PDRB. Penelitian Ramos dkk (2013) menunjukkan tidak ada hubungan yang jelas antara pertumbuhan ekonomi dengan indeks inklusif. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep dan studi kasus pertumbuhan ekonomi inklusif di negara maju dan negara berkembang, serta dan menganalisis indeks pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia.

II. Tinjauan Literatur

2.1 Konsep dan studi kasus pertumbuhan ekonomi inklusif

Pengukuran indeks ekonomi inklusif masih merupakan pendekatan yang paling sering digunakan. Tetapi, beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti individu (bukan lembaga) menggunakan pendekatan alternatif dengan menggunakan persamaan regresi. Secara umum,

penelitian-penelitian ini mengacu pada konsep hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lee dan Sisson (2016) di Inggris menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya berasosiasi dengan kenaikan upah di level pendapatan tinggi, tetapi tidak berasosiasi dengan kenaikan upah di level pendapatan menengah serta tidak terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan persentase penduduk bekerja yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak inklusif. Sebagai ukuran pertumbuhan yang multidimensional, ekonomi inklusif tidak hanya didekati menggunakan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan faktor ekonomi lainnya, namun juga keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan faktor-faktor sosial seperti gender, pendidikan, fertilitas, dan sebagainya. Garcia, Brio, dan Victorio (2018) menunjukkan bahwa faktor gender dapat mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif bila perempuan diberikan akses yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, akses lebih bebas ke lapangan kerja, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam politik.

Pertumbuhan ekonomi inklusif diawali dengan pembangunan ekonomi yang inklusif. Menurut Prasetyantoko, dkk (2012), pembangunan ekonomi inklusif adalah Pembangunan untuk semua orang, tidak peduli latar belakang dan perbedaan-perbedaannya. Hal ini senada dengan pendapat Ali dan Son (2007) yang menyatakan bahwa pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang tidak hanya menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga memastikan kesempatan yang sama untuk semua lapisan masyarakat, khususnya yang miskin. Pertumbuhan didefinisikan sebagai inklusif jika meningkatkan fungsi kesempatan sosial, yang tergantung pada dua faktor yaitu: (i) peluang rata-rata yang tersedia bagi masyarakat, dan (ii) bagaimana peluang dibagi kepada masyarakat. Pertumbuhan inklusif diukur dengan menggunakan fungsi kesempatan sosial atau fungsi kesejahteraan sosial. Pertumbuhan inklusif diukur dengan dua pendekatan yaitu *partial* dan *full*. Pendekatan *partial* berdasarkan "*opportunity curve*". Pendekatan *full* berdasarkan indeks "*opportunity curve*". Kurva kesempatan dihitung berdasarkan hasil survei rumah tangga Filipina tahun 1998 dan 2004.

Konsep pertumbuhan inklusif dalam Strategi ADB 2020 adalah pertumbuhan ekonomi dengan kesetaraan kesempatan dikembangkan oleh Ali dan Zhuang (2007) dan Zhuang (2010) yaitu tiga dimensi kebijakan dan *good governance and institutions* menuju pertumbuhan yang berkelanjutan dan memastikan semua lapisan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan. Tiga dimensi tersebut adalah: 1) pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan akan menciptakan peluang ekonomi, 2) *social inclusion* untuk memastikan setiap anggota masyarakat berkesempatan yang sama atas peluang ekonomi, 3) *social safety nets* untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan.

Terry McKinley (2010) dan ADB menyusun indeks komposit pertumbuhan inklusif di 6 negara yaitu Bangladesh, Kamboja, India, Indonesia, Filipina dan Uzbekistan dengan menggunakan data 1990-2006. Indeks inklusif ini menggunakan indikator (a) pertumbuhan, tenaga kerja produktif, infrastruktur ekonomi, (b) kemiskinan dan ketimpangan pendapatan (termasuk kesetaraan gender), (c) kapabilitas manusia dan (d) perlindungan sosial. Indeks komposit ini didasarkan dengan metode skoring dan skema penimbang. Skor dibuat menjadi 3 capaian yaitu tidak memuaskan (<4), memuaskan (4-7), dan sangat memuaskan (8-10).

International Policy Centre for Inclusive Growth UNDP dan Ramos, dkk (2013), pertumbuhan inklusif terdiri dari *outcome* dan proses, yang melibatkan partisipasi dan *benefit-sharing*. Pertumbuhan inklusif memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berpartisipasi dalam proses pertumbuhan dan memastikan manfaatnya terdistribusikan. Ramos, dkk (2013) menyusun indeks inklusif untuk 43 negara berkembang dengan data tahun 1996-2006 berdasarkan tiga indikator yaitu: kemiskinan (*headcount ratio at US\$2 a day PPP*), ketimpangan (GINI), *Employment to Population Ratio/EPR* (rasio tenaga kerja terhadap populasi). Alasannya adalah pengembangan kerangka pertumbuhan inklusif dapat diukur dari bagaimana hasil pertumbuhan didistribusikan (kemiskinan dan ketimpangan) dan bagaimana pertumbuhan mengubah peluang untuk partisipasi ekonomi (pekerjaan).

Indeks inklusif disusun melalui normalisasi data minimum kemiskinan dan ketimpangan serta *inverse ratio* tenaga kerja terhadap populasi. Masing-masing negara diberi skor menggunakan *min-max normalization* dari ketiga komponen data tersebut. Skor berdasarkan jarak dari situasi terbaik dalam kelompok negara yang dianalisis. Skor berada pada skala 0

sampai 1, semakin dekat dengan 0, semakin inklusif. Secara khusus, indeks akan mendekati 0, semakin rendah tingkat kemiskinan dan indeks Gini, dan semakin tinggi EPR-indeks rendah mengindikasikan tingkat inklusivitas yang tinggi.

Metode ini tidak memasukkan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator dalam indeks inklusivitas. Pendekatan ini berbeda dengan saran analisis kuantitatif pertumbuhan inklusif lainnya yang memasukkan pertumbuhan PDB sebagai salah satu indikator seperti penelitian Terry McKinley (2010). Hasilnya hubungan antara indeks inklusif dan pertumbuhan ekonomi tidak jelas, ada yang berhubungan positif, negatif dan tidak ada hubungan. Armenia adalah satu-satunya negara yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kinerja indeks inklusifnya rendah. Paraguay, Brazil dan Colombia menunjukkan kinerja indeks inklusifnya rendah dan pertumbuhan ekonominya rendah. Hubungan pertumbuhan ekonomi dan kinerja inklusif tidak teridentifikasi di Ethiopia, China, Zambia, Pakistan, Indonesia India, Madagaskar, Kenya, Uganda dan Bangladesh.

Pertumbuhan inklusif dapat diartikan secara sempit atau luas. Interpretasi sempit menyiratkan fokus pada pertumbuhan dan penurunan ketimpangan pendapatan. Interpretasi pertumbuhan inklusif yang lebih luas menekankan pada Pembangunan Inklusif (Rauniyar & Kanbur, 2009). Interpretasi luas menyiratkan penekanan pada ukuran *non-income* dari kesejahteraan dan kemampuan manusia, seperti kesehatan dan melek huruf, terutama sebagai hasil pembangunan manusia, bukan sebagai instrumen untuk mempercepat pertumbuhan.

World Economic Forum (2017) menyusun *Inclusive Growth and Development Index* (IDI) untuk 109 negara dengan data 2016 dimana negara-negara tersebut dikelompokkan menjadi negara ekonomi maju, negara berpendapatan menengah ke atas, negara berpendapatan menengah ke bawah dan negara berpendapatan rendah berdasarkan PDB per kapita. IDI merupakan indeks komposit berdasarkan 7 pilar yaitu *education and skills, basic services and infrastructure, corruption and rents, financial intermediation of real economy investment, asset building and entrepreneurship, employment and labor compensation, dan fiscal transfers*. Indeks inklusif merupakan hasil agregasi skor masing-masing pilar. Ketujuh pilar tersebut terdiri dari beberapa indikator. Data indikator tersebut dikonversi menjadi skala 1-7 (terburuk ke terbaik) dengan menggunakan linier *min-max transformation*. Selanjutnya skors ini diberi ranking dalam kelompok PDB per kapita. IDI Indonesia 2017 sebesar 4,29 ranking 22 dari 79 negara berkembang. Pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena berkurangnya tingkat kemiskinan dan peningkatan tenaga kerja produktif. Meski demikian, kesenjangan sosial masih tinggi dan partisipasi perempuan dalam ketenagakerjaan juga masih rendah.

Tabel 1. Perbandingan metode pengukuran pertumbuhan ekonomi inklusif

Konsep	Indikator	Metode
Ali dan Son: pertumbuhan yang menciptakan peluang ekonomi dan kesetaraan akses, khususnya masyarakat miskin	Pendidikan dan Kesehatan	<i>Opportunity curve</i>
Strategy ADB 2020 dan Ali & Zhuang: pertumbuhan yang menciptakan peluang ekonomi dan kesetaraan akses	Tiga pilar kebijakan (meningkatkan peluang ekonomi, <i>social inclusion</i> , dan <i>social safety nets</i>) dan <i>good governance and institutions</i>	Indeks komposit dengan penimbang (Terry McKinley)
UNDP dan Ramos et al: pertumbuhan dengan kesetaraan partisipasi dan <i>benefit-sharing</i>	Kemiskinan, gini ratio dan angka tenaga kerja	Skor <i>min-max normalisation</i> Skor skala 0-1 (terbaik ke terburuk)
WEF: pertumbuhan inklusif dalam arti luas	Tujuh pilar antara lain: korupsi, intermediasi keuangan, kepemilikan aset dan kewirausahaan	Indeks pertumbuhan dan pembangunan inklusif. Indeks komposit skala 1-7 (terburuk ke terbaik)

III. Data dan Metodologi

Ekonomi Inklusif didefinisikan oleh berbagai lembaga dengan beberapa pendekatan berbeda. Pada penelitian ini, beberapa pendekatan akan diperbandingkan sehingga dapat diperoleh gambaran komprehensif tentang pertumbuhan ekonomi inklusif di 33 provinsi di Indonesia. Penelitian ini mengambil periode data 2010-2015 yang seluruhnya merupakan data kuantitatif yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS).

Mengingat beragamnya definisi dan faktor-faktor yang digunakan dalam menentukan keinklusan pertumbuhan ekonomi, maka peneliti memutuskan untuk menggunakan 3 acuan utama tentang define ekonomi inklusif. Selain itu, karena data yang tersedia pada level regional tidak selengkap data level nasional, maka modifikasi jenis variabel dilakukan tanpa mengurangi esensi pilar-pilar ekonomi inklusif pada definisi yang menjadi acuan. Pada bagian selanjutnya akan dipaparkan tentang metodologi dan data-data yang digunakan untuk setiap definisi acuan.

3.1 Ekonomi Inklusif Menurut ADB

Sebagaimana yang dikutip dari McKinley (2010), ADB menggunakan beberapa variabel pokok untuk mengukur pertumbuhan ekonomi inklusif. Variabel tersebut meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Ketengakaerjaan
3. Infrastruktur Ekonomi
4. Kemiskinan
5. Ketimpangan
6. Gender
7. Kesehatan dan Nutrisi
8. Pendidikan
9. Air dan Sanitasi
10. Perlindungan Sosial

Di Indonesia, penghitungan dengan menggunakan pendekatan seperti ini sudah pernah dilakukan oleh BPS tahun 2013. Penelitian ini mengadopsi metode serupa namun menggunakan indikator yang jumlahnya lebih sedikit. Berikut ini merupakan daftar indikator untuk setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 2. Indikator ekonomi inklusif menurut ADB

No.	Variabel	Indikator
1	Pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB Per kapita, Share Pertanian, Industri, Jasa
2	Ketenagakerjaan	Persentase Angkatan kerja yang bekerja
3	Infrastruktur Ekonomi	Rumah tangga yang dapat mengakses listrik, akses internet, dan kepemilikan telepon seluler
4	Kemiskinan	Persentase penduduk miskin (P0)
5	Ketimpangan	Gini ratio
6	Gender	Indeks Pembangunan Gender, IPM Perempuan, persentase kelahiran yang ditolong tenaga medis
7	Kesehatan dan Nutrisi	Persentase balita yang sudah imunisasi campak, angka harapan hidup
8	Pendidikan	Angka Partisipasi Murni SMA
9	Air dan Sanitasi	Akses air bersih dan sanitasi
10	Perlindungan Sosial	Jaminan perlindungan sosial

Selanjutnya, untuk menjadi sebuah indeks komposit pertumbuhan ekonomi inklusif maka dilakukan tahapan sebagai berikut:

1. Normalisasi data, langkah ini dilakukan untuk menyetarakan satuan indikator-indikator yang digunakan. Formula normalisasi yang digunakan dibedakan untuk indikator yang mempunyai pengaruh positif dan yang mempunyai pengaruh negatif. Normalisasi untuk indikator positif:

$$Z_{ij} = 10 \left(\frac{X_{ijk} - X_{ij(\min)}}{X_{ij(\max)} - X_{ij(\min)}} \right) \dots\dots\dots (1)$$

Normalisasi untuk indikator negatif:

$$Z_{ij} = -10 \left(\frac{X_{ijk} - X_{ij(\min)}}{X_{ij(\max)} - X_{ij(\min)}} \right) + 10 \dots\dots\dots (2)$$

2. Untuk variabel yang memiliki lebih dari satu indikator, penghitungan nilai variabel dilakukan dengan menghitung rata-rata dari indikator-indikator penyusunnya. Penghitungan rata-rata menggunakan nilai bobot yang sama untuk setiap indikatornya.
3. Penghitungan Indeks Pertumbuhan Inklusif dilakukan dengan menjumlahkan nilai seluruh variabel yang telah dikalikan dengan bobot masing-masing variabel. Bobot setiap variabel mengikuti penimbang yang digunakan oleh ADB, sebagai berikut:

Tabel 3. Bobot variabel ekonomi inklusif menurut ADB

Variabel	Bobot
Pertumbuhan ekonomi	0.25
Ketenagakerjaan	0.15
Infrastruktur Ekonomi	0.1
Kemiskinan	0.1
Ketimpangan	0.1
Gender	0.05
Kesehatan dan Nutrisi	0.05
Pendidikan	0.05
Air dan Sanitasi	0.05
Perlindungan Sosial	0.1

4. Untuk masing-masing indikator akan diberi skor, berdasarkan performa capaiannya. Pembentukan skor dibuat menjadi 3 capaian yaitu tidak memuaskan (<4), memuaskan (4-7), dan sangat memuaskan (8-10).

3.2 Ekonomi Inklusif Menurut World Economic Forum

WEF mengukur pertumbuhan ekonomi inklusif dengan menggunakan pendekatan yang terdiri dari 7 pilar utama yaitu:

1. Pendidikan dan Pengembangan Keterampilan
2. Pelayanan Umum dan Infrastruktur
3. Korupsi
4. Intermediasi Keuangan
5. Kepemilikan Aset dan Kewirausahaan
6. Ketenagakerjaan
7. Perlindungan Sosial

Karena keterbatasan data yang tersedia pada level provinsi, maka beberapa pilar

mengalami penyesuaian indikator dengan tidak menghilangkan esensi setiap pilar. Berikut ini adalah daftar indikator yang digunakan untuk setiap kelompok pilar:

Tabel 4. Pilar ekonomi inklusif menurut WEF

No.	Pilar	Indikator
1	Pendidikan dan Pengembangan Keterampilan	Angka harapan lama sekolah dan APM SMA
2	Pelayanan Umum dan Infrastruktur	Akses air bersih, listrik, dan sanitasi
3	Korupsi	Indeks anti korupsi
4	Intermediasi Keuangan	Persentase PMTB terhadap PDRB
5	Kepemilikan Aset dan Kewirausahaan	Persentase kepemilikan rumah
6	Ketenagakerjaan	Tingkat pengangguran terbuka
7	Perlindungan Sosial	Pembiayaan raskin

Selanjutnya, untuk menjadi sebuah indeks komposit pertumbuhan ekonomi inklusif maka dilakukan tahapan sebagai berikut:

1. Normalisasi data, langkah ini dilakukan untuk menyetarakan satuan indikator-indikator yang digunakan. Formula normalisasi yang digunakan dibedakan untuk indikator yang mempunyai pengaruh positif dan yang mempunyai pengaruh negatif.

Normalisasi untuk indikator positif:

$$6 \times \frac{(\text{country score} - \text{sample minimum})}{(\text{sample maximum} - \text{sample minimum})} + 1 \dots\dots\dots (3)$$

Normalisasi untuk indikator negatif:

$$-6 \times \frac{(\text{country score} - \text{sample minimum})}{(\text{sample maximum} - \text{sample minimum})} + 7 \dots\dots\dots (4)$$

2. Untuk variabel yang memiliki lebih dari satu indikator, penghitungan nilai variabel dilakukan dengan menghitung rata-rata dari indikator-indikator penyusunnya. Penghitungan rata-rata menggunakan nilai bobot yang sama untuk setiap indikatornya.
3. Penghitungan Indeks Pertumbuhan Inklusif dilakukan dengan menghitung rata-rata aritmatika dari ketujuh pilar.
4. Nilai Indeks Pertumbuhan Inklusif akan berada dalam rentang 1 sampai 7. Nilai 1 mewakili keadaan terburuk dan nilai 7 mewakili keadaan paling ideal.

3.3 Ekonomi Inklusif Menurut *International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC-IG)* – UNDP

Dibanding dengan dua pendekatan sebelumnya, pendekatan yang digunakan oleh IPC-IG UNDP ini relative lebih sederhana. UNDP hanya menggunakan tiga variabel untuk mengukur pertumbuhan inklusif. Tiga variabel yang dipergunakan meliputi ukuran kemiskinan, ketimpangan dan ketenagakerjaan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ramos, dkk (2013), indeks inklusif dibangun dari data kemiskinan, ketimpangan, dan inverse ratio penduduk bekerja terhadap populasi yang telah dinormalisasi. Karena keterbatasan data yang tersedia pada level provinsi, maka *inverse ratio* penduduk bekerja terhadap populasi diganti dengan tingkat pengangguran terbuka.

Adapun langkah untuk menghitung indeks inklusif adalah sebagai berikut:

1. Melakukan normalisasi terhadap nilai kemiskinan, ketimpangan, dan tingkat pengangguran terbuka
2. Indeks inklusif merupakan rata-rata sederhana dari nilai kemiskinan, ketimpangan, dan tingkat pengangguran terbuka yang telah dinormalisasi
3. Nilai indeks inklusif berada pada rentang 0 -1. Semakin kecil nilai indeks inklusif, maka semakin inklusif pertumbuhan di provinsi tersebut. Ramos, dkk (2013) membagi range indeks inklusif ke dalam beberapa kelompok:
 - 0 - 0.2 : tingkat inklusif sangat tinggi
 - 0.2-0.4 : tingkat inklusif tinggi
 - 0.4-0.6: tingkat inklusif menengah
 - 0.6- 0.8: tingkat inklusif rendah
 - 0.8 -1: tingkat inklusif buruk

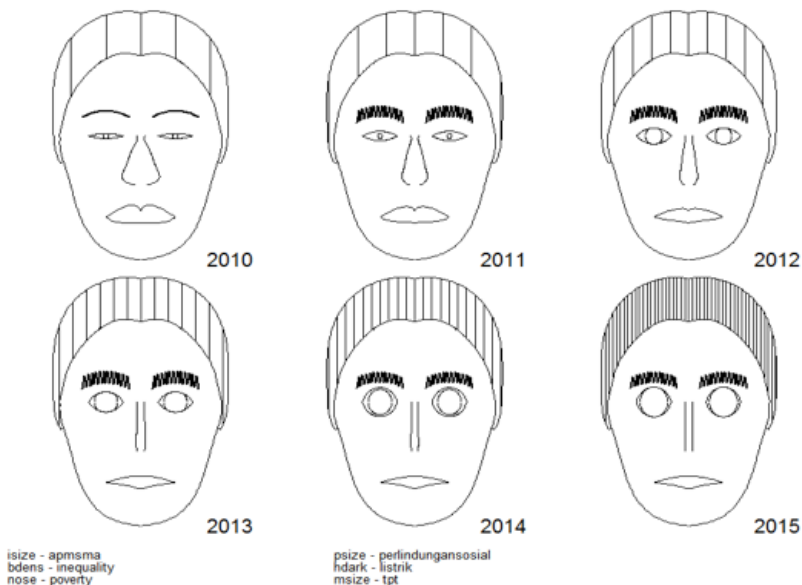
IV. Hasil dan Pembahasan

4.1 Gambaran Umum Indikator Perekonomian Inklusif

Pertumbuhan inklusif tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi semata. Faktor lain terkait pemerataan, kesejahteraan, dan pertumbuhan yang berkelanjutan menjadi penting untuk diperhatikan. Jika hanya melihat pertumbuhan ekonomi, dalam jangka waktu 2010-2015, perekonomian regional di 33 provinsi di Indonesia mampu tumbuh sekitar 4-6 persen. Pertumbuhan ini tergolong cukup tinggi, bahkan termasuk yang tertinggi di negara G20. Angka ini hanya melihat pertumbuhan akumulasi perekonomian yang terjadi, tanpa memperhatikan siapa yang menerima manfaat dari pertumbuhan kegiatan ekonomi tersebut. Ketimpangan pendapatan masih terjadi dan bervariasi antar provinsi. Jadi, pertumbuhan regional yang tinggi ini tidak menjamin kesejahteraan merata di 33 provinsi. Padahal, salah satu tujuan utama pembangunan adalah memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, perkembangan indikator kesejahteraan perlu diperhatikan untuk melihat kualitas pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

Dari beberapa literatur dan rujukan organisasi internasional, beberapa indikator utama terkait pertumbuhan inklusif antara lain persentase penduduk miskin (P0), ketimpangan ekonomi, pengangguran, pendidikan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Berikut ini adalah gambaran umum indikator pertumbuhan ekonomi inklusif Indonesia dalam kurun waktu 2010-2015 dengan menggunakan sumber data Badan Pusat Statistik.

Gambar 1. Perkembangan indikator perekonomian inklusif Indonesia 2010-2015



Jika indikator kesejahteraan Indonesia diibaratkan seperti wajah, maka kondisinya dapat dilihat sebagaimana Gambar 1. Rambut mencerminkan proporsi rumah tangga yang menggunakan listrik. Rambut yang semakin lebat dari waktu ke waktu mencerminkan bahwa rumah tangga yang dapat mengakses listrik bertambah setiap tahunnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa akses terhadap listrik sudah semakin luas. Jika dilihat secara regional, Papua masih merupakan provinsi yang mengalami kesulitan mengakses listrik selama 2010-2015. Persentase rumah tangga di provinsi Papua yang bisa mengakses listrik hanya 53.17 persen. Kondisi ini sangat timpang jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, terutama provinsi di wilayah Indonesia Barat yang persentasenya mencapai 99 persen.

Selanjutnya, ketebalan alis mencerminkan ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan (*gini ratio*) di Indonesia mengalami fluktuasi selama periode 2010-2015. Gini ratio Indonesia tahun 2010 sebesar 0,378 kemudian naik mencapai angka 0.413 di tahun 2013, turun menjadi 0,408 di tahun 2015. Secara regional, pada tahun 2015 angka ketimpangan ekonomi tertinggi terjadi di Papua Barat. Angka ini mengalami peningkatan setiap tahunnya berarti kondisi ketimpangan ekonomi di Papua Barat semakin parah. Kondisi ini dipengaruhi oleh semakin tingginya tingkat pengangguran terbuka sehingga berimplikasi terhadap melambatnya pertumbuhan pengeluaran penduduk kelompok menengah dan bawah dibanding penduduk kelompok atas.

Indikator selanjutnya adalah keberhasilan kebijakan pendidikan yang dicerminkan oleh APM SMA. Penelitian ini tidak menggunakan APM SD dan SMP karena dua jenjang tersebut sudah termasuk ke dalam program wajib belajar 9 tahun. Capaian APM SMA digambarkan oleh besarnya mata. Ukuran mata yang semakin besar mencerminkan pencapaian APM SMA yang semakin tinggi. Secara nasional, capaian APM SMA mencapai 59.71 persen di tahun 2015. Angka ini relatif moderat sehingga diperlukan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan capaian ini. Secara regional, Bali masih menduduki peringkat capaian APM SMA tertinggi, yaitu mencapai 71.53. Sementara itu, Papua masih menjadi provinsi dengan peringkat terendah, dengan capaian hanya 43.22 persen, jauh dari rata-rata angka capaian APM SMA nasional. Dari angka-angka ini dapat dilihat bahwa terdapat ketidakmerataan capaian pendidikan di Indonesia.

Tingkat kemiskinan adalah salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam pembangunan yang paling sering menjadi sorotan publik. Sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*) no. 1 yaitu *no poverty*, maka pemerintah Indonesia juga mengambil berbagai kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan. Pada gambar 1 kemiskinan dicerminkan oleh ukuran hidung. Tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 13.33 persen di tahun 2010, kemudian turun menjadi 11.22 persen di tahun 2015. Meskipun tingkat kemiskinan di Indonesia cenderung mengalami penurunan, namun penurunannya tidak sedrastis seperti yang diharapkan pemerintah. Secara regional, Papua masih menjadi provinsi yang tingkat kemiskinannya tertinggi dibandingkan provinsi lainnya. Pada tahun 2015 tingkat kemiskinan di Papua mencapai 28.4 persen, ini berarti lebih dari seperempat penduduk Papua masih berada di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan tidak terlepas dari pengangguran. Ketidakmampuan untuk mendapatkan pekerjaan masih menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia digambarkan dengan ukuran mulut. Ukuran mulut yang semakin kecil setiap tahunnya menggambarkan tingkat pengangguran terbuka semakin kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa lapangan kerja yang tersedia semakin mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Secara regional, Aceh dan Maluku merupakan provinsi yang angka pengangguran terbukanya tertinggi di Indonesia, yaitu mencapai 9.93 persen di tahun 2015. Angka ini lebih tinggi dari pengangguran terbuka secara nasional, yaitu mencapai 5.81 persen.

Perlindungan sosial juga menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam rangka pemerataan kesejahteraan. Dalam penelitian ini, perlindungan sosial menggunakan pendekatan rumah tangga yang menerima Jamkesmas (dan sejenisnya). Pada gambar 1 indikator ini diwakili oleh besarnya pupil (anak mata). Capaian persentase masyarakat yang menerima Jamkesmas mengalami kenaikan dari 18,17 persen (2010) dan 57,12 persen (2015). Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk melindungi seluruh seluruh lapisan masyarakat terutama dalam bidang kesehatan melalui program jaminan kesehatan.

Dari uraian indikator utama di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakmerataan akses dan hasil pembangunan serta kesejahteraan di 33 provinsi. Meskipun pertumbuhan

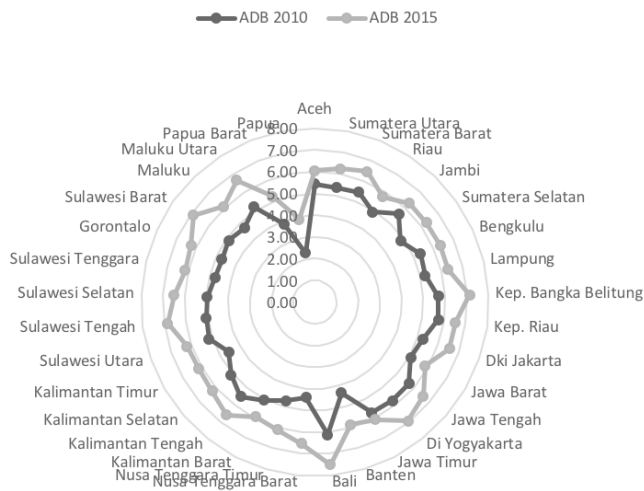
ekonomi secara regional relatif tinggi, namun tidak diikuti dengan indikator kesejahteraan yang merata. Dengan demikian, keinklusan pertumbuhan ekonomi di level provinsi menarik untuk dikaji.

Pada bagian selanjutnya, penelitian ini akan mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi inklusif di setiap provinsi. Evaluasi pertumbuhan inklusif di 33 provinsi dalam bentuk indeks komposit dan peringkat mengacu pada metode yang digunakan UNDP, World Economic Forum, dan ADB.

1. Indeks Ekonomi Inklusif ADB

Mengacu pada indikator pertumbuhan inklusif yang disusun oleh ADB, penelitian ini menggunakan 10 dimensi pertumbuhan inklusif dengan penyesuaian untuk setiap indikatornya. Perbandingan antara indeks ekonomi inklusif tahun 2010 dan 2015 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2. Perbandingan indeks ekonomi inklusif menurut ADB tahun 2010 dan 2015



Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa secara umum terdapat peningkatan indeks inklusif antara tahun 2010 dan 2015. Jika dilihat dari capaian indeks ekonomi inklusif, status pertumbuhan inklusif tahun 2010 sebagian besar provinsi memuaskan, kecuali Papua Barat dan Papua yang memiliki status tidak memuaskan. Bahkan di tahun 2015 ada beberapa provinsi naik statusnya menjadi sangat memuaskan, yaitu Bali dan Kepulauan Bangka Belitung. Namun, Papua tetap menjadi satu-satunya provinsi yang memiliki status pertumbuhan inklusif yang tidak memuaskan. Jika dicermati masing-masing dimensinya, status tidak memuaskan ini didorong oleh rendahnya nilai Papua pada dimensi infrastruktur ekonomi, ketimpangan, kemiskinan, gender, dan kesehatan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, diharapkan memprioritaskan pada dimensi-dimensi tersebut. Langkah ini perlu diprioritaskan agar Papua tidak menjadi semakin tertinggal dibandingkan provinsi lainnya. Hasil lengkap untuk status provinsi setiap tahun dapat dilihat pada Lampiran 2.

Pada pendekatan ADB ini, indikator pertumbuhan ekonomi regional yang mempunyai bobot yang cukup besar. Padahal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin pemerataan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat. Hasil penelitian Ramos et al (2013) menyebutkan bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Kemiskinan dan ketimpangan yang merupakan indikator utama kesejahteraan malah mempunyai bobot yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pada bagian selanjutnya, pendekatan pengukuran indeks ekonomi inklusif akan menggunakan

acuan yang tidak menyertakan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikatornya.

2. Indeks Ekonomi Inklusif *World Economic Forum* (WEF)

WEF membangun suatu set formula dan variabel untuk mengukur tingkat ekonomi inklusif di suatu wilayah. Pilar untuk menghitung indeks ekonomi inklusif pada pendekatan ini tidak menyertakan pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya, pertumbuhan inklusif menurut WEF menggunakan 7 indikator utama. Akan tetapi, karena adanya keterbatasan data pada level provinsi, maka indeks korupsi tidak dipergunakan dalam penelitian ini. Tidak seperti indeks ekonomi inklusif yang mengacu pada UNDP dan ADB, WEF tidak memberikan pengelompokan terkait status indeks inklusif. WEF hanya menyatakan rentang nilai inklusif berkisar antara 1-7. Semakin besar nilai indeks inklusif, maka pertumbuhan wilayah tersebut dikatakan semakin inklusif. Untuk mengetahui capaian setiap provinsi dalam kurun waktu 5 tahun, maka penelitian ini memberikan peringkat untuk setiap provinsi dari peringkat 1-33. Peringkat 1 menandakan bahwa provinsi bersangkutan merupakan yang paling inklusif pada tahun tersebut. Perbandingan indeks inklusif tahun 2010 dan 2015 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 3. Perbandingan indeks ekonomi inklusif menurut WEF tahun 2010 dan 2015



Pada Gambar 3 dapat dilihat bahwa semua provinsi mengalami peningkatan indeks inklusif dari 2010 ke 2015. Bali dan DI Yogyakarta merupakan dua provinsi yang menduduki peringkat paling inklusif. Keinklusifan ini didukung oleh tingginya nilai pada dimensi pendidikan, infrastruktur, kepemilikan aset tetap (dalam hal ini kepemilikan rumah), dan rendahnya pengangguran. Sementara itu, provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten berada pada tingkat inklusif yang kurang inklusif dilihat dari peringkatnya masing-masing 20, 32, dan 29 di tahun 2015. Ketiga provinsi ini adalah provinsi yang jumlah penduduknya banyak dengan ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat atas dan bawah yang tinggi. Sedangkan, Papua masih menjadi daerah dengan tingkat inklusifitas terburuk di antara semua provinsi di Indonesia (sama dengan dua pendekatan sebelumnya). Kondisi ini terutama dipengaruhi rendahnya kualitas pendidikan (APM SMA) dan ketersediaan infrastruktur yang lebih rendah dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Hasil lengkap untuk status provinsi setiap tahun dapat dilihat pada Lampiran 3.

3. Indeks Ekonomi Inklusif UNDP

UNDP menggunakan tiga indikator untuk mengukur pertumbuhan inklusif yaitu tingkat kemiskinan, pengangguran, dan gini ratio. Semakin rendah indeks inklusif, menandakan bahwa semakin inklusif perekonomian yang berlangsung. Berikut ini adalah ringkasan status pertumbuhan inklusif provinsi-provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 2010-2015. *High level* menunjukkan provinsi tersebut berada pada kondisi terbaik dibandingkan provinsi lainnya dalam menurunkan

tingkat kemiskinan, pengangguran, dan gini ratio. Demikian juga sebaliknya, *low level* menunjukkan provinsi tersebut berada pada kondisi terburuk dibandingkan provinsi lainnya. *Medium level* berada diantara *high level* dan *low level*.

Tabel 5. Sebaran 33 provinsi menurut status pertumbuhan inklusif UNDP 2010-2015

Status	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>high level</i>	18	16	20	18	19	18
<i>medium level</i>	12	13	11	14	13	14
<i>low level</i>	3	4	2	1	1	1

Tabel 5 menunjukkan bahwa jumlah provinsi yang statusnya *low level* sudah berkurang, di tahun 2010 ada 3 provinsi (Papua, Papua Barat dan Banten) berkurang menjadi 1 provinsi (Papua Barat) di tahun 2015. Provinsi yang berstatus *high level* ada 18 provinsi, walaupun di tahun 2011 sedikit menurun menjadi 16 provinsi. Provinsi yang statusnya medium naik jumlahnya dari 12 menjadi 14 provinsi. Adapun provinsi yang naik statusnya dari *low level* menjadi *middle* adalah Papua dan Banten. Di samping itu, provinsi-provinsi di Pulau Jawa umumnya berstatus *medium*, hal ini terutama disebabkan karena gini ratio yang tinggi.

Bila dicermati kecenderungan pertumbuhan inklusif per provinsi, ada beberapa daerah yang patut waspada. Provinsi Aceh, Jawa Timur, dan Papua Barat mengalami kecenderungan penurunan level pertumbuhan inklusif. Pada tahun 2010, Aceh berstatus *high level*, tetapi pada tahun-selanjutnya, statusnya turun menjadi *medium*. Hal yang sama terjadi pada Jawa Timur, pada tahun 2010-2014, status Jawa Timur adalah *high level*, namun pada 2015 statusnya turun menjadi *medium*. Sedangkan Papua Barat, statusnya cenderung tetap berada di *low level*, meskipun sempat naik menjadi *medium* di tahun 2013.

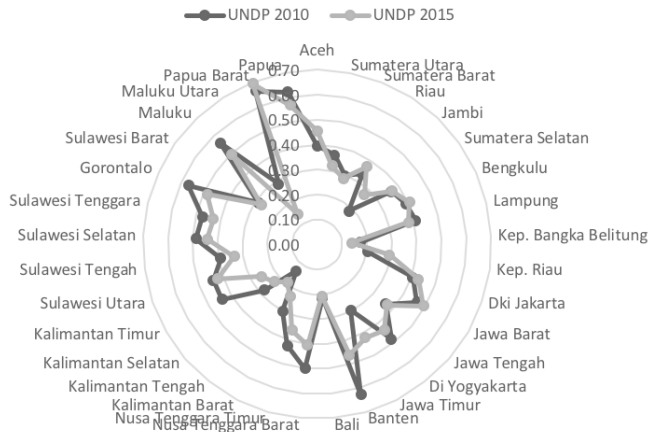
Beberapa provinsi yang patut diapresiasi adalah Lampung, NTT, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua. Keempat provinsi ini mengalami kenaikan status pertumbuhan inklusif dan dapat mempertahankannya hingga 2015. Selain provinsi yang mengalami kecenderungan naik dan kecenderungan turun, terdapat pula provinsi yang statusnya fluktuatif. Provinsi yang masuk ke kategori ini antara lain Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Tengah, NTB, dan Sulawesi Tengah.

Karena pendekatan ini hanya menggunakan 3 indikator, maka terdapat beberapa kelemahan, antara lain:

- a. Aksesibilitas wilayah tidak tergambarkan dengan baik, sehingga evaluasi untuk wilayah timur mungkin bias,
- b. Faktor keberlanjutan pertumbuhan inklusif seperti pendidikan dan kesehatan tidak tergambar oleh pendekatan ini.

Meskipun memiliki beberapa kelemahan, indeks yang dibangun dari 3 indikator ini dapat memberikan gambaran tentang ketiga permasalahan utama dalam pemerataan kesejahteraan. Kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia saat ini. Gambar 4 memberikan gambaran kondisi komposit ketiga permasalahan utama tersebut.

Gambar 4. Perbandingan indeks ekonomi inklusif menurut UNDP tahun 2010 dan 2015



Dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi permasalahan pada tahun 2010 dan 2015. Ini berarti tidak terdapat kemajuan yang signifikan dalam mengatasi kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Sebagian provinsi memang mengalami perbaikan status inklusifitas ekonomi (dilihat dari nilai indeks yang semakin kecil), namun provinsi lain mengalami penurunan status inklusifitas. Hasil lengkap untuk status provinsi setiap tahun dapat dilihat pada Lampiran 3.

V. Penutup

Hasil analisis kuantitatif, baik dengan menggunakan *single indicator* maupun indeks komposit menunjukkan secara nasional tingkat inklusifitasnya membaik. Jika dilihat secara regional, tingkat inklusifitas di 33 provinsi bervariasi dan kurang merata.

Pendekatan ADB menunjukkan semua provinsi di Indonesia indeks inklusifnya memuaskan kecuali Papua. Pendekatan metode UNDP dan WEF menunjukkan bahwa tingkat inklusifitas Papua dan Papua Barat rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Provinsi-provinsi di Jawa seperti DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten juga menunjukkan tingkat inklusifitas yang rendah, walaupun tidak separah Papua dan Papua Barat.

Untuk meningkatkan tingkat inklusifitas ini tidak lepas dari peran pemerintah pusat dan daerah dalam merencanakan kebijakan dengan prioritas yang berbeda untuk masing-masing provinsi. Peningkatan pendidikan dan ketersediaan infrastruktur menjadi prioritas kebijakan di Papua dan Papua Barat. Harapannya, infrastruktur ini dapat menggerakkan roda perekonomiannya dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Selain itu, pemerintah juga mengintegrasikan permasalahan ketimpangan pendapatan dalam setiap program dan kegiatannya, termasuk didalamnya kebijakan perlindungan sosial khususnya masyarakat miskin dan rentan.

Berdasarkan hasil penelitian, pendekatan penghitungan indeks inklusif sebaiknya tidak mempertimbangkan indikator pertumbuhan ekonomi regional. Pertumbuhan ekonomi regional yang tinggi tidak menjamin tingkat kesejahteraan juga membaik. Selain itu, Indonesia adalah negara berkembang, umumnya pertumbuhan ekonomi 33 provinsi masih berpotensi untuk tumbuh tinggi.

Daftar Pustaka

- Ali, I., & Son, H. H. (2007). Measuring Inclusive Growth. *Asian Development Review*, 11-31.
- Ali, I., & Zhuang, J. (2007, Juli). Inclusive Growth toward a Prosperous Asia: Policy Implications. *ERD Working Paper Series*. Manila: Asian Development Bank.
- Asian Development Bank. (2011). *Key Indicators for Asia and the Pasific 2011: Framework*. Manila, Phillippines: Asian Development Bank.
- Badan Pusat Statistik. (2011). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2011*. Indikator Kesejahteraan Rakyat.
- Badan Pusat Statistik. (2013). *Analisis Statistik Lintas Sektor: ANALISIS PERTUMBUHAN INKLUSIF 2013*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2013). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2013*. Indikator Kesejahteraan Rakyat.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2014*. Indikator Kesejahteraan Rakyat.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015*. Indikator Kesejahteraan Rakyat.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2016*. Indikator Kesejahteraan Rakyat.
- Cabeza-García, L., Brio, E. B., & Oscanoa-Victorio, M. L. (2018). Gender Factors and Inclusive Economic Growth: Sustainability MDPI, *Open Access Journal*, 1-14.
- Katadata. (2017, Februari 23). Katadata. Retrieved from Katadata.com: <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/01/10/di-indonesia-1-orang-terkaya-menguasai-49-kekayaan-nasional>
- Lee, N., & Sissons, P. (2016). Inclusive growth? The relationship between economic growth and poverty in British cities. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 48(11), 2317-2339 .
- McKinley, T. (2010, Juni). Inclusive Growth Criteria and Indicators: An Inclusive Growth Index for Diagnosis of Country Progress. *ADB Sustainable Development Working Paper Series*, 2. Manila, Philippines: Asian Development Bank.
- Prasetyantoko, A., Budiantoro, S., & Bahagijo, S. (2012). *Pembangunan inklusif: prospek dan tantangan Indonesia*. Jakarta: LP3ES : Prakarsa.
- Ramos, R. A., Ranieri, R., & Lammens, J.-W. (2013, Maret). Mapping Inclusive Growth. *Working Paper*, 105. Brazilia, Brazil: International Policy Centre for Inclusive Growth.
- Rauniyar, G., & Kanbur, R. (2009, June). *Conceptualising Inclusive Development: With Applications to Rural Infrastructure and Development Assistance*. Manila: Asian Development Bank.
- World Economic Forum. (2017). *The Inclusive Growth and Development Report 2017*. Geneva: World Economic Forum.
- Zhuang, J. (2010). *Poverty, Inequality, and Inclusive Growth in Asia: Measurement, Policy Issues, and Country Studies*. Manila: Asian Development Bank.